

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Wilayah Thailand Selatan, khususnya Pattani, Yala, dan Narathiwat merupakan wilayah dengan perbedaan besar secara sosial dan budaya jika dibandingkan dengan wilayah-wilayah Thailand yang lain. Jika wilayah-wilayah Thailand yang lain didominasi oleh etnis yang beragama Buddha, maka di wilayah Thailand Selatan tersebut mayoritas penduduknya merupakan etnis Melayu yang memeluk agama Islam. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh sejarah Thailand itu sendiri. Wilayah Thailand Selatan dahulunya merupakan bagian dari Kesultanan Kedah dan Pattani yang didirikan oleh orang-orang etnis melayu. Selanjutnya wilayah Thailand Selatan mulai menjadi bagian dari Thailand sejak akhir abad ke-18 di mana Kerajaan Siam berhasil melakukan penaklukan atas wilayah tersebut.<sup>1</sup>

Masyarakat Islam Thailand yang beretnis Melayu cenderung hidup berkelompok dan bermukim di bagian selatan negara Thailand, yaitu Provinsi Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla, dan Provinsi Satun yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Hal tersebut kemudian mendorong didirikannya Kesultanan Muslim di Thailand Selatan pada abad ke-18 yang merupakan salah satu bentuk usaha pemisahan diri Thailand Selatan dari negara Thailand.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Joseph Chinyong Liow dan Don Pathan, 2010, *Confronting Gost: Thailand's Shapeless Southern Insurgency*, Longueville Media, Australia.

<sup>2</sup>Ibid.

Selain karena faktor sulitnya berintegrasi dengan masyarakat Thailand yang kebanyakan beragama Bhudda, upaya pemisahan diri tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa sebab utama. Pertama, politik asimilasionis yang berlebihan dari pemerintah Thailand menyebabkan terancamnya identitas Melayu. Kedua, Ikatan historis dan psikologis dengan bangsa Melayu di Malaysia yang dilatarbelakangi oleh faktor sejarah. Serta ketiga, perbedaan etnis antara Thai dengan Melayu berdampak pada keterbelakangan ekonomi di Thailand Selatan.<sup>3</sup>

Untuk mengatasi upaya pemisahan diri tersebut, Pemerintah Thailand melakukan berbagai upaya penyelesaian konflik. Pada tahun 1940 pemerintah Thailand memaksa orang Melayu di Thailand melepaskan identitas mereka sebagai Melayu dan Muslim, selanjutnya bersatu di bawah pemerintahan Thailand. Selain itu, Muslim Melayu juga dilarang mengenakan busana tradisional Melayu dengan ciri khasnya, seperti peci bagi kaum pria dan kerudung bagi wanita. Bahasa melayu juga dilarang digunakan di Thailand. Rezim Songkhram juga memaksa masyarakat Muslim Melayu untuk mengadopsi nama Thai.<sup>4</sup>

Selain itu, masyarakat etnis Melayu juga mendapat diskriminasi dalam bidang pendidikan. Akses untuk belajar Agama Islam, seperti pondok pesantren ditutup oleh pemerintah. Pemerintah juga menghapuskan pengadilan Islam untuk menangani urusan keluarga Muslim. Seluruh pelajar dan mahasiswa di Thailand pun meski bukan pemeluk agama Buddha diwajibkan memberi penghormatan kepada gambar Buddha di sekolah-sekolah umum. Bila ada yang menolak

---

3Peter Chalk, 2001, *Separatism and Southeast Asia: The Islamic Factor in Southern Thailand, Mindanao, and Aceh*, *Journals of Studies in Conflict and Terrorism*, Vol 24 No.4, July, diakses dalam <https://www.ncjrs.gov/App/Publications/abstract.aspx?ID=190504> (diakses 29 November 2017)

4Muslim Melayu di Thailand Selatan <http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/05/04/nntfle6-muslim-melayu-di-thailand-selatan> (diakses: 14 Desember 2016)

melaksanakan kebijakan ini, akan ditangkap dan dijatuhi hukuman, bahkan tak jarang berujung kepada penyiksaan. Meskipun kemudian pemerintah melunak dengan mencabut segala aturan yang menyulitkan umat Islam.<sup>5</sup>

Penduduk di Thailand Selatan sejak dekade 1960 terlibat perang dengan pemerintah pusat karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap pembangunan ekonomi dan sosial di wilayah itu. Konflik tersebut khususnya sejak tahun 2004 semakin memanas. Hal ini dipicu oleh pertentangan kaum Muslim terhadap undang-undang yang diterapkan oleh pemerintah mayoritas Buddha di Bangkok. Usaha untuk menyelesaikan konflik di Thailand Selatan telah dilakukan pada masa pemerintahan Yingluck Shinawatra dan kedua pihak sempat menggelar beberapa putaran pembicaraan untuk mencapai kesepakatan damai, namun krisis politik di Thailand dan aksi kudeta praktis waktu lalu menghentikan upaya itu.<sup>6</sup>

Sebagai negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Thailand wilayah selatan, Malaysia merupakan negara yang akan mendapat imbas dari adanya konflik dalam negara tersebut. salah satunya yaitu adanya pengungsi dari Thailand Selatan serta adanya keinginan Thailand Selatan yang ingin menjadi bagian dari Malaysia yang merupakan negara yang memiliki ikatan historis dengan masyarakat etnis Melayu di Thailand Selatan.<sup>7</sup> Hal tersebut pada akhirnya mendorong Malaysia untuk ikut andil dalam penyelesaian konflik domestik tersebut. Pada tahun 2014, Malaysia meminta militer Thailand untuk memimpin

---

5Muslim Melayu di Thailand Selatan<http://www.republika.co.id/berita/koran/khazanah-koran/15/05/04/nntfle6-muslim-melayu-di-thailand-selatan> (diakses: 14 Desember 2016)

6Malaysia dan Upaya Memediasi Konflik di Thailand Selatan<http://indonesian.tribune.com.au/editorial/fokus/item/84439-malaysia-dan-upaya-memediasi-konflik-di-thailand-selatan> (diakses: 12 Desember 2016)

7Chumphot Nurakkate, 2012, *The Conflict in Southern Thailand*, CDSS Publications, Australia.

negosiasi dan mengakhiri masalah di wilayah selatan, yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.<sup>8</sup>

Hal ini menjadi menarik untuk diteliti karena dalam *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) terdapat prinsip “*non-intervensi*” yang menyatakan bahwa jika terjadi konflik dalam suatu negara anggota ASEAN maka negara anggota lain tidak berhak untuk melakukan intervensi di dalamnya.<sup>9</sup> Dalam konflik domestik ini Malaysia memilih untuk ikut melakukan intervensi dalam penyelesaian konflik, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti mengenai “Kepentingan Malaysia Dalam Bertindak Sebagai Mediator Dalam Konflik di Thailand Selatan” dengan lebih mendalam.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Bagaimana Malaysia melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik domestik di Thailand Selatan?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan alasan atau kepentingan Malaysia dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

### **1.3.2. Manfaat penelitian**

- a. Dapat memberikan informasi mengenai konflik yang terjadi di Thailand Selatan serta keterlibatan Malaysia dalam menyelesaikan konflik di Thailand Selatan.

---

<sup>8</sup>Malaysia dan Upaya Memediasi Konflik di Thailand Selatan <http://indonesian.tribe.ir/editorial/fokus/item/84439-malaysia-dan-upaya-memediasi-konflik-di-thailand-selatan> (diakses: 12 Desember 2016)

<sup>9</sup>ASEAN, *The ASEAN Declaration*, 8 Agustus 1967, Bangkok.

- b. Dapat digunakan sebagai acuan penelitian lain untuk tahap selanjutnya bagi yang membahas tentang konflik Internasional mengenai konflik di wilayah Asia Tenggara.

#### 1.4. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat banyak penelitian terdahulu yang menjadi penekan orisinalitas penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian terdahulu pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Desy Arisandy yang mengangkat judul "*Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan periode 2000-2009*". Penelitian ini menggunakan metode penelitian analisa data deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini Desy membahas tentang berbagai cara Malaysia mengatasi gerakan separatis di Thailand Selatan yaitu dengan melakukan kunjungan kesepakatan yang merupakan bagian dari diplomasi. Peneliti juga membahas tentang dampak yang diakibatkan oleh dua negara yang bersangkutan, upaya yang dilakukan kedua negara untuk mengatasi konflik diperbatasan dan kepentingan kedua negara melakukan berbagai kunjungan dan kesepakatan sebagai bagian dari diplomasi. Dengan menggunakan konsep diplomasi, Desy mengangkat tentang cara diplomasi Malaysia pada Thailand Selatan dalam menyelesaikan konflik ini.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Desy Arshandi, 2012, *Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan Periode 2000-2009* dalam <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24110/1/DESY.pdf> (diakses November 2016) 19

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Lia Aprila Fitria di Universitas Mulawarman dengan judul *“Upaya Pemerintah Thailand Dalam Penyelesaian Konflik Di Thailand Selatan tahun 2004-2009”*. Penelitian yang dilakukan oleh Lia merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan. Penelitiann yang dilakukan Lia menggunakan Teori Penyebab Konflik dan Teori Konflik. Dalam penelitian ini peneliti banyak membahas tentang faktor apa saja yang memicu terjadinya konflik dan apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand dalam menangani konflik tersebut serta membahas sejarah konflik di Thailand Selatan.<sup>11</sup>

Penelitian terdahulu selanjutnya merupakan penelitian dari Gede Richard Pramudita, Idin Fasisaka, Putu Titah Kawatri Resen dengan mengangkat Judul *“Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan Tahun 2004-2006”*. Penelitian ini menggunakan medote penelitian kualitatif deskriptif. Fokus penelitian ini adalah mengenai tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam merespon gerakan etnonasionalis yang terjadi di Thailand Selatan pada tahun 2004 hingga 2006 yang mampu mengancam keamanan nasional negaranya.<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agus R. Rahman yang berjudul *“Hubungan Perbatasan Antara Thailand*

---

11Lia Aprilia Fitria, 2016, *Upaya Pemerintah Thailand Dalam Penyelesaian Konflik Di Thailand Selatan Tahun 2004-2009*, dalam [http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/19%20\(11-01-16-02-27-39\).pdf](http://ejournal.hi.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2016/11/19%20(11-01-16-02-27-39).pdf)(diakses: 16 Desember 2016)

12Gede Richard Pramudita et. al., 2015, *Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan*, dalam <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download/14082/9718>(diakses: 18 Desember 2016)



*dan Malaysia: Kerjasama Perbatasan dan Lintas Batas Ilegal*". Dalam penelitian ini, Rahman menjelaskan tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Thailand dan juga Malaysia dalam menegakkan fungsi perbatasan guna mengatasi adanya aktifitas lintas batas ilegal antar kedua negara tersebut. Dengan menggunakan teori *frontiers, boundary, border cooperation* serta *illegal border crossing* sebagai alat analisis, ditemukan bahwa bahwa kerjasama perbatasan kedua negara dilakukan baik secara bilateral dan multilateral dalam konteks ASEAN. Kerjasama bilateral tampaknya belum maksimal untuk mengatasi aktivitas lintas batas yang ilegal, sedangkan kedua negara mendukung kerjasama multilateral dalam konteks ASEAN dalam hal masalah kejahatan transnasional. Baik Thailand maupun Malaysia tidak bermaksud untuk membawa masalah-masalah perbatasan yang lain di luar konteks bilateral kedua negara.<sup>13</sup>

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Chumphot Nurakkate yang berjudul "*The Conflict in Southern Thailand*". Dalam penelitiannya, Nurakkate menemukan hasil bahwa identitas nasional sebagai masyarakat melayu-lah yang menjadi kekuatan utama masyarakat di Thailand Selatan melakukan pemberontakan.<sup>14</sup> Faktor historis serta prinsip "berjihad" membawa masyarakat di Thailand Selatan untuk melakukan pemberontakan dan berkeinginan mendirikan negara sendiri.

---

<sup>13</sup>Agus R. Rahman, 2013, *Hubungan Perbatasan Antara Thailand dan Malaysia: Kerjasama Perbatasan dan Lintas Batas Ilegal*, Jurnal Penelitian Politik, Vol 10, Nomor 2, Desember 2013, dalam <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/438/251> (diakses 10 Desember 2017)

<sup>14</sup>Chumphot Nurakkate, Op.Cit.

Penelitian Harish menyatakan bahwa identitas merupakan penyebab utama adanya konflik di Thailand Selatan. Selain identitas sebagai masyarakat etnis melayu, identitas sebagai muslim juga merupakan salah satu penyebab adanya pembrontakan. Selain itu, penelitian yang berjudul “*Changing Conflict Identity: The Case of The Shouthern Thailand Discord*” ini juga menganalisis bagaimana konflik yang sudah ada sejak abad ke-20 itu mengalami perubahan.<sup>15</sup>

Penelitian selanjutnya berjudul “*The Role of Haji Sulong In Fighting Special Autonomy For Patani Shouthern Thailand (1947-1954)*”. Penelitian yang dilakukan oleh Husam Lamato et. Al. ini membahas mengenai perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi untuk Thailand Selatan yang dilatarbelakangi adanya diskriminasi terhadap etnis melayu muslim di Thailand Selatan. Penelitian ini membahas konflik yang terjadi di Thailand Selatan dari sudut pandang Masyarakat Thailand Selatan yang merasa didiskriminasi dengan adanya kebijakan penghapusan budaya melayu.<sup>16</sup>

Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Yurisa Irawan yang berjudul “*Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Konflik Thailand Selatan*”. Dalam penelitiannya Irawan menjelaskan bahwa secara historis, konflik berakar dari penguasaan Kesultanan Melayu

---

15S.P. Harish, 2006, *Changing Conflict Identity: The Case of The Shouthern Thailand Discord*, Institute of Defense and Strategic Studies, Singapore, dalam <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP107.pdf> (diakses 10 Desember 2017)

16Husam Lamato et al, 2017, *The Role of Haji Sulong In Fighting Special Autonomy For Patani Shouthern Thailand (1947-1954)*, Jurnal Historia, Volume 1, Nomor 1, dalam <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/JHIS/article/download/5100/3763/> (diakses 08 Desember 2017)



Pattani oleh Kerajaan Siam Thailand lewat Traktat Anglo-Siam pada tahun 1902. Diskriminasi terhadap budaya, berupa bahasa dan agama, masyarakat Patani menjadi penyebab konflik. Kondisi ini mengundang perhatian Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk terlibat dalam penyelesaian masalah sebagai pihak ketiga. Dianalisis dengan menggunakan Model Hourglass oleh Ramsbotham, dan kawan-kawan, penelitian ini menyimpulkan bahwa OKI dalam kurun waktu 2005-2015 melakukan bentuk resolusi konflik berupa transformasi konflik, penyelesaian konflik, dan pengurangan konflik. Tujuannya adalah mencegah agar konflik serupa seperti tahun 2004 tidak terulang kembali.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Sanakorn Mamuang et al. dengan judul “*Understanding the Sustainability of Insurgency Conflict in Thailand*”. Dalam penelitiannya, Mamuang et al. meneliti tentang konflik yang terjadi di Thailand Selatan sebagai pemberontakan berkepanjangan serta menghasilkan model konflik. Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu tahap pertama, teknik time series digunakan untuk menentukan apakah konflik yang terjadi rasional dan melibatkan perilaku interaktif. Tahap kedua mengadopsi teknik distribusi Weibull untuk menilai konflik politik. Pada tahap ketiga, analisis statistik dilakukan terhadap konflik situasi dalam hal politik.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Yurisa Irawan, 2016, *Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Konflik Thailand Selatan*, Universitas Andalas, Padang, Indonesia, dalam <http://scholar.unand.ac.id/8501/5/Skripsi%20Yurisa%20Irawan.pdf> (diakses 08 Desember 2017)

<sup>18</sup>Sanakorn Mamuang, 2013, *Understanding the Sustainability of Insurgency Conflict in Thailand*, Journal of Organizational Transformation and Social Change, Bangkok, Thailand, dalam [https://www.researchgate.net/profile/Maurice\\_Yolles/publication/283255127\\_Understanding\\_the\\_Sustainability\\_of\\_Insurgency\\_Conflict\\_in\\_Thailand/links/562efdeb08ae518e34838ac6/Understanding-the-Sustainability-of-Insurgency-Conflict-in-Thailand.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Maurice_Yolles/publication/283255127_Understanding_the_Sustainability_of_Insurgency_Conflict_in_Thailand/links/562efdeb08ae518e34838ac6/Understanding-the-Sustainability-of-Insurgency-Conflict-in-Thailand.pdf) (diakses 08

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian dari Baiq L.S.W. Wardhani yang berjudul “*Mengukur Probabilitas Keterlibatan Indonesia Dalam Resolusi Konflik di Thailand Selatan*”. Dalam penelitiannya Wardhani menjelaskan bahwa untuk menjadi pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik internasional, Indonesia harus memberikan peran apa yang harus dimainkannya, apakah sebagai pihak yang membuka komunikasi antar pihak yang bertikai, menjadi pihak yang terlibat dalam perundingan, atau menjalankan dua fungsi tersebut sekaligus fungsi monitoring pasca konflik. Pemberontakan di Thailand Selatan merupakan jenis protracted social conflict (PSC).<sup>19</sup>

Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Mohd Mizan Aslam. Penelitian Aslam berjudul “*Penyelesaian Konflik Selatan Thailand Dengan Menggunakan Model Gagasan 1 Malaysia*”. Dalam penelitiannya, Aslam menjelaskan bahwa adanya pembrontakan besar-besaran pada tahun 2004 merupakan bentuk protes masyarakat Thailand Selatan dengan ketimpangan demokrasi di Thailand, terutama Thailand Selatan. Masyarakat Thailand Selatan menuntut Thailand dikembalikan menjadi negara demokratis serta tidak terdapat diskriminasi terhadap etnis melayu muslim. Pada 2006 Yinluck Sinawatra, memanfaatkan situasi ini untuk meraih banyak dukungan dengan mengusung semboyan “satu Malaysia”. Semboyan tersebut dianggap mampu menarik simpati

---

Desember 2017)

<sup>19</sup>Baiq L.S.W. Wardhani, 2008, *Mengukur Probabilitas Keterlibatan Indonesia Dalam Resolusi Konflik di Thailand Selatan*, Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Volume XXI, Nomor 1, halaman 77-84, dalam [http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20naskah%2010%20\(77-84\).pdf](http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-Lepasan%20naskah%2010%20(77-84).pdf) (diakses 08 Desember 2017)

warga Thailand Selatan agar tidak melakukan pembrontakan dan ikut berpartisipasi dalam pemilu.<sup>20</sup>

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh MR. Ilham Nuereng yang berjudul “*Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*”. Dalam penelitian ini, Nuereng melakukan penelitian lapangan dengan metode deskriptif-analitis. Dengan menggunakan pendekatan Sosiologi Politik islam serta menggunakan teori konflik Rahl Dahrendorf, penelitian ini menemukan hasil bahwa terjadinya konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor historis, faktor agama, faktor sosial dan faktor politik.<sup>21</sup>

Meskipun sama-sama membahas mengenai konflik di Thailand Selatan serta campur tangan Malaysia dalam penyelesaiannya, akan tetapi terdapat perbedaan antara penelitaian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu sebelumnya. Dalam penelitaian yang dilakukan oleh penulis, penulis akan lebih memfokuskan penelitian ini pada kepentingan Malaysia di balik campur tangannya dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan tersebut. selain itu, konsep dan teori yang digunakan penulis untuk menganalisa studi kasus ini juga berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

---

20Mohd Mizan Aslam, 2012, *Penyelesaian Konflik Selatan Thailand Dengan Menggunakan Model Gagasan 1 Malaysia*, Journal of Human Development and Communications, Volume 1, halaman 137-152, dalam

<http://dspace.unimap.edu.my/xmlui/bitstream/handle/123456789/41438/Penyelesaian%20Konflik%20Selatan%20Thailand.pdf?sequence=1> (diakses 17 Desember 2017)

21MR. Ilham Nuereng, 2016, *Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, dalam <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/download/1438/1244> (diakses 10 Desember 2017)

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Penelitian/Judul Penelitian	Konsep/Teori	Hasil
1	Desy Arisandy: <i>Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis di Thailand Selatan periode 2000-2009</i>	Eksplanatif Konsep Diplomasi, Kerjasama Keamanan, Kepentingan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri	Meskipun gerakan separatis masih terjadi, namun kedua Negara tersebut baik Malaysia maupun Thailand mengaku cukup puas dengan kerjasama yang dilakukan, hal itu setidaknya dapat mengembalikan hubungan diplomatic yang sempat mengalami ketegangan.
2	Lia Aprila Fitria: <i>Upaya Pemerintah Thailand Dalam Penyelesaian Konflik Di Thailand Selatan tahun 2004-2009</i>	Deskriptif Teori Penyebab Konflik dan Teori Konflik	Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Thailand menurutnya kurang berhasil. Dari ketiga upaya yang dilakukan berupa: Konsiliasi, Mediasi dan Koersi hanya Konsiliasi yang merupakan pemberian subsidi dan pembentukan pemberian otonomi daerah dapat dikatakan berhasil.
3	Gede Richard Pramuditaet al: <i>Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme di Thailand Selatan Tahun 2004-2006</i>	Eksplanatif Konsep Etnonasionalisme dan Konsep Tindakan Koersif	Pemerintah Thailand mengeluarkan sejumlah kebijakan-kebijakan untuk merespon serangan yang terjadi, seperti mengeluarkan Undang-Undang Darurat Militer, Kebijakan State of Emergency, hingga melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang disinyalir terlibat dalam organisasi etnonasionalisme di Thailand Selatan.
4	Agus R. Rahman: <i>Hubungan Perbatasan Antara Thailand dan Malaysia: Kerjasama Perbatasan dan Lintas</i>	Teori <i>frontiers</i> , <i>boundary</i> , <i>border</i> <i>cooperation</i> serta <i>ilegal</i>	kerjasama perbatasan kedua negara dilakukan baik secara bilateral dan multilateral dalam konteks ASEAN.

No	Nama Penelitian/Judul Penelitian	Konsep/Teori	Hasil
	<i>Batas Ilegal</i>	<i>border crossing</i>	
5	Chumphot Nurakkate: <i>The Conflict in Soutern Thailand</i>	<i>Role of Identity</i>	Identitas nasional sebagai masyarakat melayu-lah yang menjadi kekuatan utama masyarakat di Thailand Selatan melakukan pemberontakan.
6	S.P. Harish: <i>Changing Conflict Identity: The Case of The Shouthern Thailand Discord</i>	<i>Role of Identity</i>	Penyebab utama adanya konflik di Thailand Selatan. Selain identitas sebagai masyarakat etnis melayu, identitas sebagai muslim juga merupakan salah satu penyebab adanya pembrontakan.
7	Husam Lamato et. al.: <i>The Role of Haji Sulong In Fighting Special Autonomy For Patani Shouthern Thailand (1947-1954)</i>	Konsep Historiografi	Perjuangan Haji Sulong dalam memperjuangkan otonomi untuk Thailand Selatan yang dilatarbelakangi adanya diskriminasi terhadap etnis melayu muslim di Thailand Selatan.
8	Yurisa Irawan: <i>Strategi Resolusi Konflik Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Dalam Konflik Thailand Selatan</i>	Konsep Organisasi Internasional	OKI dalam kurun waktu 2005-2015 melakukan bentuk resolusi konflik berupa transformasi konflik, penyelesaian konflik, dan pengurangan konflik. Tujuannya adalah mencegah agar konflik serupa seperti tahun 2004 tidak terulang kembali.
9	Sanakorn Mamuang et al.: <i>Understanding the Sustainability of Insurgency Conflict in Thailand</i>		Konflik yang terjadi di Thailand Selatan sebagai pemberontakan berkepanjangan serta menghasilkan model konflik
10	Baiq L.S.W. Wardhani: <i>Mengukur Probabilitas</i>	Teori Resolusi Konflik	Untuk menjadi pihak ketiga dalam



No	Nama Penelitian/Judul Penelitian	Konsep/Teori	Hasil
	<i>Keterlibatan Indonesia Dalam Resolusi Konflik di Thaliand Selatan</i>		menyelesaikan konflik internasional, Indonesia harus memberikan peran apa yang harus dimainkannya, apakah sebagai pihak yang membuka komunikasi antarpihak yang bertikai, menjadi pihak yang terlibat dalam perundingan, atau menjalankan dua fungsi tersebut sekaligus fungsi monitoring pasca konflik
11	Mohd Mizan Aslam: <i>Penyelesaian Konflik Selatan Thailand Dengan Menggunakan Model Gagasan 1 Malaysia</i>		Adanya pembrontakan besar-besaran pada tahun 2004 merupakan bentuk protes masyarakat Thailand Selatan dengan ketimpangan demokrasi di Thailand, terutama Thailand Selatan. Masyarakat Thaliand Selatan menuntut Thailand dikembalikan menjadi negara demokratis serta tidak terdapat diskriminasi terhadap etnis melayu muslim.
12	MR. Ilham Nuereng: <i>Dinamika Bernegara Masyarakat Muslim Thailand Selatan dalam Perspektif Sosiologi Politik Islam</i>		Terjadinya konflik di Thailand Selatan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor historis, faktor agama, faktor sosial dan faktor politik
13	Rizky Senja Ramadhiany: Kepentingan Pemerintah Malaysia Dalam Memediasi Konflik di Thailand Selatan.	Deskriptif Kepentingan Nasional Resolusi Konflik	Kepentingan Malaysia ikut serta dalam menyelesaikan konflik ini karena adanya banyak kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand jauh sebelum konflik ini terjadi. Selain itu, campur tangan



No	Nama Penelitian/Judul Penelitian	Konsep/Teori	Hasil
			Malaysia juga didasari atas wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Thailand Selatan yang rentan dengan adanya konflik.

## 1.5. Kerangka Teori

### 1.5.1. Kepentingan Nasional

Kepentingan Nasional adalah merupakan salah satu konsep yang dikenal luas di kalangan studi Hubungan Internasional dan Politik Internasional baik itu pengamat aliran tradisional atau saintifik. Konsep Kepentingan Nasional merupakan konsep yang menjadikan negara-bangsa sebagai aktor utama dalam HI. Banyak pendapat ahli menyatakan bahwa determinan utama yang menggerakkan negara-negara menjalankan hubungan internasional (*international relation*) adalah kepentingan nasional negara itu sendiri.<sup>22</sup>

Menurut Hans J. Morgenthau, Kepentingan Nasional merupakan usaha negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain.<sup>23</sup> Kepentingan nasional di ibaratkan sebagai tujuan, cita-cita dan harapan yang ingin dicapai oleh suatu negara. Hubungan antar negara terjadi akibat adanya usaha untuk memenuhi kepentingan yang ingin dicapai. Hal ini menjadi faktor yang mendorong negara-negara untuk saling menjaga hubungan baik dengan negara lainnya.

<sup>22</sup>Drs T May rudy, 2002, *Studi Strategis Dalam Transformasi System Internasional Pasca Perang Dingin*, Bandung: PT Rafika Aditama. Hal. 60

<sup>23</sup>Hans, J. Morgenthau, 2010, "*Politic Among Nations, the Struggle for Power and Peace*", edisi Bahasa Indonesia, diterjemahkan oleh S.Maimoen, A.M. Fatwan, Cecep Sudrajat, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.

Morgenthau juga membagi kepentingan nasional itu sendiri menjadi 2 jenis, yaitu.<sup>24</sup>

1. *Core/basic/vital interest*; dimana dalam hal ini kepentingan nasional suatu negara merupakan kepentingan yang sangat tinggi nilainya. Sehingga, jika kepentingan tersebut tidak tercapai, maka akan membahayakan kelangsungan negara tersebut. Untuk melindungi kepentingan ini, sebuah negara bahkan rela berperang dengan negara lain. Seperti kepentingan dalam melindungi kedaulatan negara, wilayah teritorial negara serta kepentingan nasional yang menyangkut keamanan suatu negara.
2. *Secondary interest*; yaitu kepentingan nasional suatu negara yang meliputi segala macam keinginan yang ingin dicapai oleh suatu negara, dengan tidak mengharuskan negara tersebut melakukan perang. Hal ini dikarenakan dianggap masih ada jalan lain untuk mencapainya, seperti perundingan. Contoh kepentingan nasional yang merupakan bentuk dari *secondary interest* adalah seperti kepentingan sosial, ekonomi, serta kepentingan-kepentingan lain yang tidak harus dicapai dengan jalan perang.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kepentingan nasional merupakan kebutuhan dasar suatu negara dalam mempertahankan negaranya dengan menggunakan berbagai macam cara untuk mencapai kebutuhan dasar tersebut. Dalam memenuhi kepentingan nasional diatas, negara merumuskan kebijakannya.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup>Ibid. Halaman 52-53.

<sup>25</sup> Teuku May Rudy, 1993, *Teori Etika dan Kebijakan Hubungan Internasional*, Bandung: Angkasa, hal 57-58

Suatu konflik yang terjadi dalam suatu negara dapat mengganggu stabilitas hubungan baik antar negara yang telah terjalin. Sehingga untuk meminimalisir dampak konflik terhadap hubungan antar Negara tersebut maka ada usaha yang dilakukan untuk saling membantu dalam menyelesaikan konflik tersebut. Sedangkan adanya campur tangan dari negara lain dalam menyelesaikan konflik internal di suatu negara tersebut tidak terlepas dari adanya suatu kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Negara yang memberikan bantuan. Sehingga konsep kepentingan Negara ini dapat menjelaskan latar belakang suatu Negara membantu dalam menyelesaikan konflik internal negara lain.

Konflik di Thailand Selatan adalah sebuah konflik internal dalam negara yang dimana ada beberapa kelompok yang berusaha memisahkan daerah Thailand Selatan dari Negara Thailand. Konflik di Thailand Selatan menjadi konflik yang berkepanjangan yang akhirnya Malaysia sebagai Negara yang berbatasan langsung dengan Thailand Selatan ikut serta membantu Thailand dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Dalam keikutsertaannya untuk menyelesaikan konflik tersebut, Malaysia memiliki beberapa kepentingan nasional yang ingin dicapai yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Dalam hal ini, kepentingan nasional yang ingin dicapai oleh Malaysia meliputi kepentingan sosial dan ekonomi, dimana Malaysia merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Thailand Selatan. Sehingga dengan adanya konflik tersebut akan mempengaruhi interaksi sosial antar negara serta kerjasama yang terjalin antar kedua negara tersebut. Adanya tuduhan bahwa Malaysia memberikan dukungan terhadap kelompok separatis di Thailand Selatan juga

merupakan bentuk ancaman terhadap kedaulatan negara Malaysia itu sendiri. Hal itu menjadi alasan kuat Malaysia untuk melakukan mediasi dalam penyelesaian konflik tersebut. Alasan lain yaitu posisi geografis negara yang berbatasan secara langsung membuat Malaysia mengalami kekhawatiran akan kondisi keamanan negaranya di wilayah perbatasan.

### 1.5.2. Resolusi Konflik

Menurut Johan Galtung, konflik dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik struktur serta konflik aktor. Konflik struktur membahas mengenai struktur sosial yang membagi negara ke dalam kelas-kelas, yaitu *core*, *semi-periphery*, dan *periphery*. Sedangkan konflik aktor digambarkan sebagai konflik yang terjadi ketika aktor mengalami kesulitan untuk memobilisasi sumber daya yang dimilikinya guna mencapai tujuan, yang mana hal itu membutuhkan kontrol atas internal organisasinya.<sup>26</sup>

Adanya konflik tersebut membutuhkan penyelesaian agar konflik yang timbul tidak membesar. Sehingga, dengan adanya konflik, maka dibutuhkan yang namanya Resolusi Konflik. Teori resolusi konflik ini selanjutnya digunakan untuk menganalisis bagaimana intervensi Malaysia dalam konflik domestik Thailand.

Upaya Malaysia dalam melakukan mediasi dalam konflik domestik Thailand tersebut merupakan salah satu bentuk dari upaya *peacemaking*, yaitu berusaha menciptakan kondisi damai di Thailand melalui jalan negosiasi. Dengan adanya upaya mediasi oleh Malaysia, diharapkan baik pihak pemerintah Thailand

---

<sup>26</sup>Johan Galtung, 1973, *Theories of Conflict: Definitions, Dimensions, Negations, Formations*, University of Hawaii, halaman 25-31.

maupun kelompok separatis Thailand Selatan bersedia melakukan negosiasi untuk berdamai. Sedangkan Malaysia yang berperan sebagai pihak ketiga tidak berhak dalam memutuskan apakah pihak pemerintah Thailand dan kelompok separatis Thailand Selatan berdamai atau tetap dalam situasi konflik. Malaysia hanya berperan sebagai mediator dalam proses perdamaian tersebut.

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, dimana penelitian ini hanya mendeskripsikan kepentingan atau alasan keterlibatan Malaysia dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan serta upaya yang dilakukan Malaysia dalam membantu penyelesaian konflik domestik tersebut.

### **1.6.2 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi kepustakaan dalam metode pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian. Studi Pustaka (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari dan mengkaji data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.<sup>27</sup> Adapun sumber yang didapat melalui jurnal, website, buku-buku, surat kabar, laporan, dan lain sebagainya.

### **1.6.3 Teknik Analisa Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis oleh Miles & Huberman yaitu analisis data kualitatif yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas, sampai datanya

---

<sup>27</sup> Amiran.I Ine Yousda dan ZainalArifin,1993, Penelitian dan Statistik Pendidikan, Bumi AksaraBandung.

menemukan titik jenuh. Aktivitas tersebut meliputi kondensasi data, penyajian data, lalu verifikasi data dan kesimpulan.<sup>28</sup>

## **1.7. Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.7.1. Batasan Materi**

Batasan materi dalam penelitian ini yaitu hanya membahas tentang kontribusi serta kepentingan Malaysia dalam menangani konflik yang terjadi di Thailand Selatan.

### **1.7.2. Batasan Waktu**

Batasan waktu dalam penelitian ini adalah sejak Malaysia menyatakan keinginannya untuk berperan dalam menyelesaikan konflik ini pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2015.

## **1.8. Argumen Pokok**

Terdapat empat kepentingan nasional yang ingin dicapai Malaysia dalam keikutsertaannya untuk penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Pertama kepentingan ekonomi, dimana terdapat banyak kerjasama yang dilakukan oleh Malaysia dan Thailand jauh sebelum konflik ini terjadi. Kedua, kepentingan Sosial dimana dengan adanya konflik maka akan mempengaruhi interaksi sosial antar masyarakat kedua negara. Ketiga, kepentingan keamanan, dimana wilayah Malaysia yang berbatasan langsung dengan wilayah Thailand Selatan sehingga adanya konflik membuat keamanan wilayah perbatasan menjadi terganggu. Terakhir, kepentingan kedaulatan, dimana pihak pemerintah Thailand sempat menuduh Malaysia memberikan dukungan terhadap kelompok separtis. Hal ini

---

<sup>28</sup>Matthew B. Miles and A. Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Arizona State University, Washington DC.



merupakan ancaman bagi kedaulatan Malaysia, sehingga dengan adanya campur tangan Malaysia tersebut dapat memuihkan nama baik Malaysia tersebut.

### **1.9. Sistematika Penulisan**

**Bab I Pendahuluan** : terdiri dari beberapa sub-bab yaitu: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Ruang Lingkup Penelitian, Argumen Pokok, dan Sistematika Penulisan. Metode Penelitian terdapat sub-bab Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Teknik Analisa Data. Ruang Lingkup Penelitian terdapat sub-bab Batasan Materi dan Batasan Waktu Penelitian.

**Bab II** : Pada bab II penulis memaparkan mengenai Konflik di Thailand Selatan terdiri dari beberapa sub-bab Sejarah Konflik di Thailand Selatan, Dampak Konflik di Thailand Selatan, Respon Pemerintah Terhadap Pemberontakan di Thailand Selatan, Keterlibatan Malaysia Dalam Konflik di Thailand Selatan, dan yang terakhir Upaya Mediasi Oleh Malaysia Serta Proses Negosiasi Dalam Mengakhiri Situasi Konflik di Thailand Selatan.

**Bab III** : Berisi tentang Alasan Malaysia dalam Bidang Keamanan dan Kedaulatan Dalam Mediasi Konflik Thailand Selatan, sub-bab Alasan Keamanan Malaysia Dalam Mediasi Konflik Thailand Selatan dan Alasan Kedaulatan Malaysia Dalam Mediasi Konflik Thailand Selatan.

**Bab IV** : Berisi tentang Alasan Malaysia dalam Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi Dalam Mediasi Konflik Thailand Selatan, sub-bab Alasan Sosial Malaysia Dalam Mediasi Konflik Thailand Selatan dan Alasan Ekonomi Malaysia Dalam Mediasi Konflik Thailand Selatan.

**Bab V Penutup :** sub-bab berupa Kesimpulan dan Saran

